

**KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN
BANYUWANGI BERDASARKAN PERDA NO 13 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

Widiyatul Hasanah /1710111034

Dosen Pembimbing : Yunita Reykasari S.H.,M.H.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

Email : widiyatulhasanah05@gmail.com

Abstrak

Pariwisata adalah kegiatan rekreasi diluar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktifitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. Pada hakikatnya berpariwisata adalah proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya.

Kata Kunci : pariwisata, negara.

Abstrak

Tourism is a recreational activity outside the domicile to escape from routine work or find another atmosphere. As an activity, tourism has become an important part of the basic needs of developed communities and a small part of people in developing countries. In essence, tourism is a process of temporary departure from someone or more to another place outside their place of residence.

Keywords: tourism, country.

1. Pendahuluan

Banyuwangi sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur mempunyai potensi wisata yang perlu untuk dikembangkan, wilayah yang memiliki Cagar Alam dan Taman Nasional, serta keindahan pantainya menjadikan Banyuwangi sebagai objek wisata lokal maupun mancanegara. Potensi alam dan sumber daya manusia mempunyai pengaruh besar dalam membangun perkembangan pariwisata Banyuwangi.

Saat ini pariwisata menjadi sektor yang sangat menarik dan menjanjikan untuk dikembangkan.¹ Sektor pariwisata merupakan kegiatan yang tak pernah mati dan menjadi hal yang sangat penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, lebih dikhususkan untuk pemerintah daerah, objek wisata akan menjadi pemasukan bagi daerah itu sendiri. Dengan berkembangnya pariwisata, akan mendongkrak sektor yang lain, seperti: kunjungan wisatawan, ekonomi kreatif, membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran. Sektor pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, dan harus didukung oleh kegiatan-kegiatan penunjang lainnya, yaitu: promosi wisata, fasilitas yang ditawarkan, akses transportasi dan tempat penginapan. Terkait arah pengembangan pariwisata Indonesia, program visit Indonesia yang dirancang sejak tahun 2008 dan dilanjutkan hingga sekarang, telah membawa semangat baru bagi masyarakat untuk mengelola pariwisata di Indonesia. Melalui upaya strategi pengembangan obyek wisata, pemasaran, dan peningkatan pelayanan, harapan akan semakin meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi target yang ingin dicapai.²

¹ Karyono, A. H. *Kepariwisataan*. Jakarta : Gramedia Widiasarana.

² Lako, Andreas. "Manfaat Green Business". *Koran Sindo* 26 Oktober 2013. Halaman 11.

Eksistensi suatu obyek wisata sangat tergantung kepada Pemerintahan Daerah, wisatawan dan masyarakat lokal. Pemerintahan Daerah selaku pengelola obyek wisata harus dapat melihat wisatawan sebagai faktor yang menentukan dan menjadi prioritas utama. Selain wisatawan masyarakat lokal memegang fungsi penting bagi keberlangsungan bisnis obyek dan daya tarik wisata. Artinya posisi masyarakat lokal menjadi faktor penggerak sekaligus pengawasan bagi suatu jalannya bisnis industri pariwisata di daerahnya. Dengan demikian akan terciptanya suatu hubungan yang sinergis dalam pengembangan obyek wisata, sebab Pemerintahan Daerah, masyarakat lokal dan wisatawan memiliki andil besar dalam memajukan destinasi wisata.³

Pada awal kepemimpinan Abdullah Azwar Annas yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010, Beliau memiliki komitmen dalam membangun pariwisata di Banyuwangi dengan membuat program-program pembangunan dan pengembangan pariwisata Banyuwangi. Pengembangan pariwisata di Banyuwangi di payungi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi. Perda tersebut merujuk pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Poin konsideran dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional dan pembangunan kepariwisataan diperlukan

³ BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi. 2015. *Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi.

untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dengan demikian, daerah dituntut berperan aktif dalam pengembangannya.⁴

Sebagaimana tertulis pada poin konsideran Perda Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi, pengembangan pariwisata dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga Pemkab Banyuwangi berkewajiban melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup di masyarakat dan kelestarian lingkungan.⁵

2. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana Kebijakan Strategi Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Perda No 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan ?

3. Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan

⁴ *Buku panduan wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi: Banyuwangi Regency Culture and Tourism Device.*

⁵ *Sastrayuda, Gumelar S., 2010. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata. Handout mata kuliah.*

merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Dengan Metodologi penulisan yang tepat, diharapkan hasil penulisan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Berikut ini beberapa metode penulisan yang dipergunakan.

3.1 Metode Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan didalam penelitian hukum. Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dipenelitian ini, maka pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian yuridis normatif ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Sedangkan Pendekatan konseptuak adalah pendekatan yang merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Strategi Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.

4.1 Kebijakan Pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi

Menurut pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata menyatakan bahwa strategi pembangunan pariwisata kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Banyuwangi terutama yang bergerak dibidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi. Pariwisata dapat diartikan sebagai segala macam kegiatan atau perjalanan wisata yang dilakukan untuk sementara waktu dan didukung dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama untuk masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah , dalam hal ini pendapatan asli daerah dapat diartikan sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi didaerah itu sendiri. Misalnya pendapatan dari kegiatan sektor pariwisata. Dengan adanya sektor pariwisata, lebih dikhususkan untuk Pemerintah Daerah, objek pariwisata akan menjadi pemasukan bagi daerah itu sendiri khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Sektor pariwisata juga mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

- c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal atau budaya yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan, kelembagaan dapat diartikan sebagai suatu hubungan dan tatanan antar anggota masyarakat atau organisasi yang melekat, diwadahi dalam suatu bentuk organisasi untuk saling membantu anggotanya dalam berinteraksi antar anggota satu dengan anggota lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, yang dimana secara turun temurun telah dipraktikkan dan dipelihara.
- d. Meningkatkan kualitas produk barang atau jasa yang dapat diperjual belikan, serta meningkatkan sumberdaya pariwisata dan lingkungan secara integral berdasarkan asas kesinambungan, asas kesinambungan itu sendiri adalah konsep yang memberi pandangan bahwa perusahaan akan beroperasi dalam jangka yang panjang dan dipengaruhi oleh faktor finansial dan non finansial, serta berapresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku.
- e. Menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata nasional, wisata nasional dapat diartikan sebagai suatu kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah suatu negara, dimana titik beratnya orang-orang yang melakukan kegiatan perjalanan pariwisata adalah warga negara itu sendiri dan warga asing yang berdomisili di negara tersebut. Serta menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai tujuan wisata internasional, wisata internasional adalah suatu kegiatan perjalanan wisata antarbenua, atau perjalanan pariwisata lintas negara dengan tujuan berbisnis atau mencari hiburan, dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan

pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia.

- f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antar manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata.

Sebagaimana telah tertulis pada poin konsideran Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi, pembangunan dan perkembangan pariwisata dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemkab Banyuwangi berkewajiban melaksanakan pembangunan kepariwisataan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai agama, sosial dan budaya yang hidup di masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dinas pariwisata Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan ketentuan dari pasal 9 Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, dalam pasal tersebut menjelaskan tentang strategi pembangunan kepariwisataan yang baik dan benar. Ketentuan dari isi Perda tersebut telah diterapkan oleh Dinas Pariwisata diberbagai destinasi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi yang saat ini menjadi objek wisata unggulan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, di antaranya adalah :

1. Kawah Ijen
2. Pulau Merah
3. Bangsring Underwater atau Rumah Apung

4. Pantai Boom
5. Grand Watu Dodol
6. Taman Nasional Baluran
7. Taman Alas Purwo

Adapun upaya lainya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Seperti melakukan upaya pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan suatu proses yang tidak hanya dapat mengembangkan perekonomian masyarakat yang notabennya kurang mampu tetapi juga dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Dinas Pariwisata melatih masyarakat Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkan pariwisata setempat, masyarakat dilatih bagaimana mengembangkan sebuah destinasi itu dan mengoptimalkan potensi wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Masyarakat banyuwangi dilatih untuk menciptakan peluang-peluang usaha di sektor pariwisata. Dalam kedudukannya sebagai salah satu stakeholder, masyarakat memiliki fungsi dan peran sebagai tuan rumah sekaligus sebagai subjek pengembangan yang turut aktif dalam memberikan peran dan kontribusinya dalam pembuatan keputusan dalam pembangunan kepariwisataan.⁶

Dari upaya pengembangan pariwisata diatas ada juga Faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi , yaitu adanya berbagai macam budaya, adat dan tradisi, dengan adanya berbagai macam budaya, adat dan tradisi di Kabupaten Banyuwangi Dinas Pariwisata harus benar benar memahami

⁶ Wawancara dengan Darrmanto, selaku Staf Bidang Produk Pariwisata, Banyuwangi 08 Februari 2021

setiap kerakter masyarakat yang berbeda beda itu. Sebagai contoh masyarakat di Desa Kedungrejo Muncar Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai tradisi upacara petik laut , upacara petik laut tersebut diselenggarakan di bulan suro tanggal 15 ketika bulan bulat penuh. Sedangkan di daerah lain, ada juga budaya dan tradisi yang disebut Seblang Olehsari, Seblang merupakan upacara bersih desa tepatnya di desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Upacara seblang dilakukan untuk menolak balak yang diwujudkan dengan mementaskan kesenian sakral yang di sebut “Seblang” yang berbau mistis. Seblang Olehsari ditarikan oleh wanita selama tujuh hari dan penari tersebut menari dalam keadaan kesurupan, mereka menari mengikuti gending atau lagu-lagu yang dinyanyikan oleh beberapa sinden.

Dari beberapa perbedaan budaya dan tradisi diatas, Dinas pariwisata harus benar-benar memahami setiap karakter masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan budaya dan tradisi di daerah masing-masing, agar setiap daerah dapat melestarikan dan menjaga budaya dan tradisinya.⁷

Solusi yang tepat untuk meminimalisir faktor penghambatan dalam pengembangan pariwisata tersebut adalah dengan melakukan pendekatan yang persuasif kepada masyarakat. Pendekatan pesuasif adalah prosen pendekatan yang dilakukan dengan cara membujuk dan mendekati, tidak mengandung unsur pemaksaan dan kekerasan. Dapat diartikan juga pendekatan persuasif merupakan sebuah komunikasi, yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Perintah dan larangan hanya bantuan sederhana dalam menolong anak untuk melakukan kebaikan dan menghindari kesalahan. Komunikasi Persuasif juga membiarkan orang lain (*persuader*)

⁷ Wawancara dengan Darrmanto, selaku Staf Bidang Produk Pariwisata, Banyuwangi 08 Februari 2021

bebas melakukan apapun yang mereka inginkan setelah persuader berusaha meyakinkan mereka. Komunikasi persuasif menekankan keterbukaan, kepercayaan, dan praktik-praktik manajemen yang demokratis.⁸

5. Penutup

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, dilaksanakan dengan cara mengembangkan Pembangunan Pariwisata yang terintegrasi. Pembangunan Pariwisata tersebut dapat melalui tiga langkah, yaitu :

a. Konsolidasi infrastruktur

penyediaan layanan informasi yang baik dan mempersiapkan fasilitas yang diperlukan oleh wisatawan. Seperti jalan akses dari kawasan wisata yang satu ke daerah wisata yang lain. Hal ini diperlukan untuk memperlancar arus kendaraan wisatawan.

b. Kekayaan budaya lokal

kekayaan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah itu sendiri harus dijaga dan dilestarikan.

c. Komunikasi pariwisata

Suatu aktivitas seseorang dalam menyampaikan informasi tentang perjalanan ke suatu objek pariwisata.

⁸ Abdullah Munir, 2010, *Pendidikan Karakter Membangun Karakter Anak sejak dari Rumah*, PT Pustaka Insan Madani, Anggota IKAPI, Yogyakarta. hlm. 11

Ketiga langkah tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain, poin pertama yaitu konsolidasi infrastruktur, penyediaan layanan informasi dan menyediakan fasilitas untuk para wisatawan, misalnya seperti lampu penerangan jalan dan akses jalan yang bagus untuk menuju kawasan wisata satu dengan kawasan wisata lainnya. Dengan adanya infrastruktur yang baik dan benar kekayaan budaya lokal akan gampang terealisasi misalnya budaya lokal yang ada di Kabupaten Banyuwangi akan semakin dikenal oleh banyak orang. Kekayaan budaya lokal itu sendiri harus terus dijaga dan dilestarikan sehingga akan lebih meningkatkan minat masyarakat lokal atau manca negara untuk berkunjung ke destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Poin komunikasi pariwisata itu sendiri tak kalah penting juga karena dengan adanya komunikasi pariwisata ini wisatawan akan mengetahui rute perjalanan ke suatu destinasi pariwisata, komunikasi pariwisata dilakukan dengan memnginformasikan para wisatawan tentang suatu destinasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan layanan informasi tersebut sudah disediakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Saran

Meskipun pembangunan pariwisata di Banyuwangi telah menunjukkan perkembangan yang baik, namun upaya peningkatan harus selalu dilakukan. Adapun rekomendasi dari peneliti untuk terus meningkatkan upaya pembangunan terintegrasi dalam mewujudkan Banyuwangi sebagai kota pariwisata internasional adalah sebagai berikut:

- a. Menambah transportasi dan trayek bus perintis untuk menuju kawasan wisata satu dengan wisata lainnya guna meningkatkan aksesibilitas, terutama untuk kawasan wisata unggulan Kabupaten Banyuwangi.

- b. Menjaga kualitas dan kuantitas even pariwisata. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan demi memancing minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi.
- c. Meningkatkan promosi paket wisata di Banyuwangi melalui media yang lebih luas. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui media cetak dan elektronik serta bekerjasama dengan *travel agent*.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Munir, 2010, *Pendidikan Karakter Membangun Karakter Anak sejak dari Rumah*, PT Pustaka Insan Madani, Yogyakarta.

Anonim, *Panduan Sadar Wisata 3*. 1996. Departemen Daerah Tingkat 1. Jakarta.

Bambang Sunaryono, 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Cetakan 1, Gava Media, Yogyakarta.

Damanik, Phil Janianton. 2013. *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. *Buku Panduan Wisata*, Banyuwangi Regency Culture and Tourism Device, Bayuwangi.

Gamal Suwanto. 2002. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta.

Inu Kencana Syafie, 2010 *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama. Jakarta.

Ismayanti. 2019. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.

Karyono, A. H. 2010. *Kepariwisataaan*. Gramedia Widiasarana. Jakarta.

Muhammad ali. 2007. *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*. UB press. Malang.

Ni'matull Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung.

Noeng Muhadjir. 2000. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Raka saranin. Yogyakarta.

Oka A. Yoeti. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa. Bandung.

Petter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghali Indonesia, Jakarta.

Philipus M. Hadjon.2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta.

Ridwan HR. 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sedermayanti, 2014 , *Membangun Dan Mengembangkan Kebudayaan Dan Industri Pariwisata*, Cetakan 1, PT Refika Aditama, Bandung.

Sartono Kartodirdjo, 1993, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, PT Gramedia, Jakarta.

Sidi Gazalba, 1981 *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, Bhratara Karya, Jakarta.

Siagian, Sondang. 2012. *Administrasi Pembangunan : konsep, Dimensi dan Strateginya*. PT. Bumi Aksara.Jakarta.

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. UB Press.Malang.

Victor Situmorang. 1989. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Cetakan 1,Jakarta Bima Aksara, Jakarta.

A. JURNAL

Ashdiana, I. M. (2014). *Penerbangan ke Banyuwangi Tambah, Penumpang Naik*.

Diakses pada tanggal 7 Oktober 2014 melalui www.travel.kompas.com.

BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi. 2015. *Rencana Kerja Pembangunan Daerah*.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, *Banyuwangi The New Paradise of Indonesian Tourism: Visitor's Guide Book* (Banyuwangi: Dinpar, 2015. Kabupaten Banyuwangi.Banyuwangi: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi.

Lako, Andreas. "Manfaat Green Business". *Koran Sindo* 26 Oktober 2013.

Sastrayuda, Gumelar S., 2010. *Konsep Pemberdayaan Berbasis Masyarakat. Pariwisata. Handout mata kuliah. Tanpa Penerbit*.

Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi.

C. WAWANCARA

Wawancara dengan Darrmanto, selaku Staf Bidang Produk Pariwisata, Banyuwangi 08 Februari 2021.

